

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum). Kemudian, menjelaskan bahwa Pemilihan umum merupakan representasi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari segala prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi menerima segala keputusan mengenai penyelenggaraan negara yang dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat, dan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya, tujuan yang diharapkan tercapai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum secara langsung ialah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam berpartisipasi dengan mengusung calon pemimpin ataupun saat memilih pemimpin-pemimpin yang akan dipilih (Titik, 2011).

Pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Terselengnya pemilu secara langsung aman dan demokratis tentu bukanlah salah satu tolak ukur bahwa kualitas demokrasi di daerah telah terwujud. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ada berbagai indikator dan faktor yang harus terus dibangun guna menyempurnakan kualitas demokrasi di Indonesia terutama terkait dengan peran dan fungsi partai politik sebagai alat perjuangan. Demokrasi merupakan sistem dimana para pengambil keputusan kolektifnya dipilih melalui pemilu, di dalam pemilu para calon atau partai bebas bersaing untuk merebut suara masyarakat, sehingga dalam pengertian ini demokrasi sendiri mengandung dua aspek yaitu kompetisi dan partisipasi.

Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah (Surbakti, 1992). Sebagai pilar demokrasi, partai politik merupakan lembaga yang sangat penting untuk ditingkatkan derajat pelembagaannya agar terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Eksistensi sebuah partai politik ditentukan dari keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum. Untuk memperoleh suara dari konstituen (anggota masyarakat pendukung partai) agar mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Partai politik yang gagal dalam pemilihan umum akan terancam eksistensinya dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan Sebaliknya Partai politik yang sukses akan bisa memegang jalannya kekuasaan selama satu periode (Arifin, 2002). Tidak dipungkiri keberadaan suatu partai politik menyeluruh di berbagai daerah dan dipastikan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pengaruh tersebut diantaranya terhadap jumlah kursi dan kedudukan anggota partai di suatu daerah, apabila suatu partai memenangkan kontestasi politik maka partai tersebut akan mempunyai power lebih besar dibandingkan dengan partai lain, sehingga memungkinkan jika masing-masing partai politik berlomba untuk mempertahankan bahkan merebut kekuasaan dari partai lain.

Pelembagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam pemilihan umum. Seperti yang dikemukakan oleh (Firmanzah, 2008). Kemampuan partai politik dalam mencapai fungsi dan tujuannya merupakan integrasi dari struktur organisasi, perilaku aktor dan kelompok dalam organisasi,

serta proses di dalam partai politik tersebut. Hal ini tidak dipungkiri lagi karena sejatinya tujuan utama partai politik terjun kedalam kontestasi pemilihan umum untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di pos yang strategis. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik atau kandidat yang diusungnya. Sebagai organisasi sosial politik, partai politik tentu membutuhkan dukungan atau hak suara masyarakat sebagai pemilih agar kader-kadernya dapat memegang otoritas dilingkungan pemerintah guna mewujudkan visi dan misi partai politik tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut partai politik membutuhkan suatu strategi tertentu untuk meraih dukungan sebanyakbanyaknya dari masyarakat dalam pemilihan langsung.

Dalam pilkada Sumenep tahun 2020 yang di ikuti oleh 2 pasangan calon yakni dengan nomor urut satu Ach Fauzi dan Ny. Hj. Dewi Kholifah dengan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, dan partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi. Sedangkan pasangan nomor urut kedua yakni Fattah Jasin dan KH Ali Fikri yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7 kursi, Partai Hanura 2 kursi, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 3 Kursi, sesuai dengan data BAWASLU kabupaten Sumenep. Pemilu kali ini bisa dikatakan menarik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pasangan nomor urut dua dengan jumlah partai pengusung lebih banyak bisa dikalahkan oleh pasangan nomor urut pertama dengan jumlah partai yang lebih sedikit.

Hal ini terbukti dengan menangnya pasangan calon bupati yang diusung oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang sering dikenal dengan PDIP di kabupaten Sumenep dalam kontestasi pilkada Sumenep tahun 2020. Bisa dibilang kemenangan pasangan nomor urut 01 yakni Ach Fauzi dan Ny. Hj. Dewi Kholifah tidak terlepas dari pengaruh dan strategi yang dirancang oleh partai PDIP yang dikomandani oleh Bapak Sa'ied Abdullah juga merupakan

DPR RI dari partai yang sama, sehingga secara tidak langsung gerakan dan strategi politik partai PDIP di Sumenep sangat taktis dan massif untuk menguasai dan mengisi pos-pos sentral yang berpengaruh terhadap pemerintahan di kabupaten Sumenep. Selain itu kemenangan pasangan calon bupati nomor urut 01 Ach Fauzi dan Ny. Hj. Dewi Kholifah diluar dugaan masyarakat Sumenep, karena mayoritas suara yang beredar di kalangan masyarakat sumenep pada umumnya yakni pasangan nomor urut 02 Fattah jasin dan KH Ali Fikri.

Sedangkan jika melihat dari popularitas partai yang ada di Kabupaten Sumenep partai PDIP bisa dikatakan masih berada di urutan ketiga setelah partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai persatuan pembangunan (PPP) hal ini dibuktikan dengan jumlah kursi yang ada di dalam structural DPRD kabupaten Sumenep dimana PKB mempunyai 10 kursi dan PPP mempunyai 7 kursi, sedangkan PDI sendiri mempunyai 5 kursi, dari data di atas menandakan bahwa PDIP masih kalah jauh dibandingkan dengan dua partai lainnya yang mayoritas kadernya dari kalangan kiyai. Terlepas dari factor diatas, semua itu tidak jadi kendala bagi partai PDIP untuk meloloskan kadernya untuk menang dalam pemilihan bupati Sumenep 2020. Pasalnya partai PDIP sebagian besar kadernya berasal dari kalangan non pesantren (bukan kiai) akan tetapi strategi dan kemampuan membaca dan memetakan suara di lapangan (berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep) menjadikan pasangan calon Bupati yang diusung oleh partai PDIP yakni nomor urut 01 Ach Fauzi dan Ny. Hj. Dewi Kholifah bisa memenangkan kontestasi ini walaupun menang dengan selisih sangat tipis yakni 319.876 suara.

Dari penjelasan diatas menjadi alasan peneliti tertarik untuk menulis dan meneliti tentang staretegi pemenangan partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep dalam pilkada tahun 2020. Sebagaimana yang dimaksud dengan strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk

mencapai sasaran khusus. Tentu arti perang yang dimaksud ialah kontestasi pemilihan bupati di kabupaten Sumenep. Selain itu yang Menjadi hal menarik bagi peneliti adalah dulu pada tahun-tahun sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkuasa dan mendominasi di Kabupaten Sumenep, tetapi pada pilkada tahun 2020 PDI Perjuangan dapat mengalahkan dominasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemenangan partai politik PDIP dalam pilkada di Kabupaten Sumenep tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui strategi pemenangan partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep dalam pilkada 2020.
- b) Untuk menjelaskan strategi yang dibangun oleh partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep dalam pemenangan pilkada 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau sebagai pengetahuan lebih lanjut mengenai strategi pemenangan partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep dalam pilkada tahun 2020. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk memahami strategi partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep sendiri. Melalui penelitian ini, terdapat juga beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada :

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai gerakan partai politik PDIP di Kabupaten Sumenep
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berdampak positif, khususnya bagi masyarakat Sumenep sendiri dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.